

**ANALISIS TINGKAT REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA APBD
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2007-2018**

AHMAD MURAD

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani,
Selong-Lombok Timur
e-mail : ahmadmurad2012@gmail.com

ABSTRAKS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio kemandirian keuangan daerah pada APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008-2017 menganalisis tingkat realisasi penerimaan pajak daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah pada APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008-2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Objek penelitian ini adalah tingkat realisasi penerimaan pajak daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah pada APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008-2017.

Pengambilan data dilakukan dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dokumentasi. Menurut Suharso (2009:104), dokumentasi adalah data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau file (catatan konvensional maupun elektronik), buku, tulisan, laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Data ini diperoleh dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Selong Kabupaten Lombok Timur berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Selong tahun anggaran 2008-2017 dan data pemungutan pajak tahun 2008-2017 dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi pemerintah daerah Lombok Timur dari tahun 2008 -2017. Derajat desentralisasi tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2010 dan 2011 menurun akan tetapi PAD tetap mengalami peningkatan,

Kata-kata Kunci : Rasio Penerimaan Pajak Dan Kemandirian Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelumnya sistem pemerintahan di Indonesia adalah sentralistik yang menimbulkan ketidak merataan keadilan bagi daerah, namun sejak tahun 1999 sistem pemerintahan diubah menjadi desentralisasi atau yang sering dikenal dengan era otonomi daerah. Sehubungan dengan itu, pemerintah mengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2004. Kedua Undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Alasan diselenggarakannya otonomi daerah adalah karena rakyat Indonesia menghendaki adanya keterbukaan dan kemandirian. Tujuan dari otonomi daerah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Ariyani, 2009:8).

Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*Public Services*). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Pembangunan yang dilaksanakan banyak memberikan manfaat bagi daerah diantaranya: meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, mendorong perkembangan perekonomian daerah, mendorong peningkatan pembangunan daerah disegala bidang, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mendorong kegiatan investasi.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi diantaranya adalah Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah dan Pinjaman Daerah. Untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat maka daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber daya yang dimiliki agar menjadi sumber penerimaan daerah (PAD).

PAD merupakan sumber pembiayaan Pemerintah Daerah yang perannya sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber PAD terdiri dari: (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan (laba BUMD), (4) lain-lain PAD yang sah seperti penjualan aset tetap daerah dan jasa giro. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah daerah harus mampu

menggali sumber penerimaan pada sektor pajak dan retribusi daerah agar terus meningkat.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan otonomi daerah tidak diiringi dengan mandirinya keuangan pemerintah daerah, khususnya di pemerintah kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Hal mencerminkan masih tergantungnya pemerintah daerah terhadap kucuran dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu menjadi fenomena dalam penelitian ini mengenai kemandirian keuangan pemerintah daerah tersebut meskipun kecenderungan pendapatan asli daerahnya meningkat. Beberapa faktor yang bisa menentukan besarnya pendapatan asli daerah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah mengenai tingkat realisasi penerimaan pajak daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah pada APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "Analisis Tingkat Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008-2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka rumusan masalah adalah Bagaimana tingkat realisasi penerimaan dan kemandirin pajak Daerah pada APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui tingkat realisasi penerimaan dan kemandirian pajak daerah pada APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008-2017.

TINJAUAN PUSTAKA

3.1.1 Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Masrun (1986) menyatakan bahwa kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kretif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya.

Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan seberapa efektifnya target target perencanaan terhadap realisasinya. Ada beberapa referensi yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Halim (2002) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Pembangunan} + \text{Lain-lain Pendapatan yang Sah}} \times 100\%$$

Selain itu, rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan

daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi sebagaimana yang digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Presentasi (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
< 10,00 %	Sangat Kurang
10,01 - 20,00 %	Kurang
20,01 - 30,00 %	Sedang
30,01 - 40,00 %	Cukup
40,01 - 50,00 %	Baik
> 50,01	Sangat Baik

(Halim, 2002).

Selanjutnya, pola hubungan kemandirian keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah dapat dikatakan ideal apabila sumber pendapatan asli daerah menyumbang bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibandingkan dengan sumber lainnya. Namun dalam kenyataannya di banyak daerah, pendapatan asli daerah tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran, proporsinya terhadap pendapatan selain dari pendapatan asli daerah merupakan indikasi derajat Kemandirian Keuangan Daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Klasifikasi dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi dari setiap variabel yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) *Pajak Daerah* adalah kontribusi wajib kepada daerah-daerah yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011).
- 2) *Keuangan Daerah* adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah (Halim, 2007).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2002: 10) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif lebih banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.

3.3 Objek penelitian

Objek pada penelitian ini adalah tingkat realisasi penerimaan pajak daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah pada APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008-2017.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Pada umumnya jenis data ada 2 (dua) yaitu :

1. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.
2. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa gambaran umum tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, dan data kuantitatif berupa hasil tingkat realisasi penerimaan pajak daerah dan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah.

3.4.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa Pegawai atau staff di kantor APBD Pemerintah Kabupaten Lombok timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian diperoleh secara tidak langsung, berupa bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasi.

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dokumentasi. Menurut Suharso (2009:104), dokumentasi adalah data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau *file* (catatan konvensional maupun elektronik), buku, tulisan, laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Data ini diperoleh dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Selong Kabupaten Lombok Timur berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Selong tahun anggaran 2008-2017 dan data pemungutan pajak tahun 2008-2017 dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

3.6 Tehnik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan objek penelitian di Kabupaten Lombok Timur propinsi Nusa Tenggara Barat. Data dalam penelitian ini bersumber dari laporan APBD Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur yakni data PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan lain-lain dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya setelah data dikumpulkan, maka peneliti menganalisis data keuangan menggunakan beberapa rumus sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010) adalah sebagai berikut:

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk menganalisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rumus yang

digunakan yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber : Halim, 2004 : 189

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Untuk menganalisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Rasio Ketergantungan daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 1.2

Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:77)

3) Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Untuk menganalisis Rasio Efektifitas Pajak Daerah, rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Rasio Efektifitas pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1.3

Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2010:143)

4) Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Untuk menganalisis Rasio Efisiensi Pajak Daerah, rumus yang

digunakan yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1.4

Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
< 10 %	Sangat Efisien
10 % - 20 %	Efisien
21 % - 30 %	Cukup Efisien
31 % - 40 %	Kurang Efisien
>40 %	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi (2010 : 143)

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur

4.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Lombok Timur terletak antara 116-117 derajat Bujur timur dan 8-9 derajat Lintang Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah di sebelah barat, Selat Alas di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah utara dan Samudra Indonesia di sebelah selatan.

Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur termasuk daerah pantai dihitung 4 mil dari garis pantai tercatat 2.679,88 km persegi, terdiri atas daratan seluas 1.605,55 km persegi (59,91%) dan lautan dengan luas 1.074,33 km persegi (40,09%). Di Kabupaten Lombok Timur juga terdapat pulau-pulau kecil sebanyak 40 buah. Dari pulau-pulau ini hanya 10 pulau yang berpenghuni. Dari daratan seluas 1.605,55 km persegi atau 160,555 hektar tersebut sekitar 115,055 hektar (71,61%) berupa lahan kering dan 45.502 hektar (28,39%) berupa lahan sawah.

4.1.2 Visi Misi

1. Visi

Visi Kabupaten Lombok Timur 2013-2018, tidak terlepas dari Visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur 2005–2025. Di lain pihak, RPJPD Kabupaten Lombok Timur juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi NTB 2005-2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah NTB Nomor 3 Tahun 2008 dan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007.

2. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh melalui pengembangan lembaga keuangan, investasi dan kemudahan perizinan
- b. Meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber daya manusia
- c. Meningkatkan infrastruktur antar wilayah
- d. Revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan
- e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
- f. Meningkatkan kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
- g. Meningkatkan kualitas Iman dan Taqwa, serta kearifan budaya lokal
- h. Meningkatkan keamanan, persatuan dan kesatuan

4.1.3 Keadaan Penduduk

Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu pada tahun 2008 sebanyak 1.174.689 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 575.128 jiwa atau 48,97% dan perempuan sebanyak 599.561 jiwa atau 51,03%. Dengan perincian per kecamatan sebagai berikut :

Tabel 4.1

**Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Keruak	23.732	23.561	47.293	4,02
2	Jerowaru	24.541	24.653	49.167	4,18
3	Sakra	26.990	26.718	53.708	4,57
4	Sakra Barat	25.025	25.283	50.308	4,28
5	Sakra Timur	21.995	22.161	44.156	3,75
6	Terara	33.798	32.948	66.746	5,68
7	Montong Gading	22.976	22.329	45.305	3,85
8	Sikur	34.618	35.211	69.829	5,94
9	Masbagik	45.215	46.190	91.405	7,78
10	Pringgasele	25.657	25.824	51.481	4,38
11	Sukamulia	16.006	16.232	32.238	2,74
12	Suralaga	29.019	27.804	56.823	4,83
13	Selong	37.520	37.125	74.645	6,35
14	Labuhan Haji	27.623	27.629	55.252	4,70
15	Pringgabaya	47.051	47.604	94.655	8,05
16	Suela	21.302	20.862	42.164	3,58
17	Aikmel	50.815	48.468	99.283	8,45
18	Wanasaba	36.198	34.324	70.522	6,00
19	Sembalun	10.114	9.597	19.711	1,67
20	Sambelia	14.960	45.038	59.998	2,31
	Jumlah	575.128	599.561	1.174.689	100

Sumber Data : Dinas KTT- Kab. Lombok Timur Tahun 2017

4.1.4 Perekonomian

Dalam periode 2014 – 2017 sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Lombok Timur dengan kontribusi sebesar 40,95 % (2014), 40,95 % (2015), 40,25 % (2016) dan 38,95 % (2017). Meskipun kontribusi terbesar PDRB berasal dari sektor pertanian; namun sektor ini belum mendapat perhatian selama periode 2014- 2017 yang ditunjukkan dengan menurunnya kontribusi sektor pertanian dalam periode 2014- 2017. Dalam pada itu, sektor lain yang memberikan kontribusi terhadap PDRB setelah sektor pertanian adalah perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar 15,65 % (2014), 15,49 % (2015), 15,57 % (2016), 16,44 % (2017).

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

1. Derajat Desentralisasi

Tabel 4.2 menunjukkan derajat desentralisasi pemerintah daerah Lombok Timur dari tahun 2008 -2017. Derajat desentralisasi tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2010 dan 2011 menurun akan tetapi PAD tetap mengalami peningkatan. Selanjutnya, peningkatan rata-rata derajat desentralisasi selama 10 tahun tersebut adalah 7,45% yang berarti masih rendah. Tingkat rasio yang paling kecil adalah tahun 2010 dan 2011 yaitu 4,42%, persentase tingkat derajat desentralisasi paling besar adalah tahun 2015 yaitu 10,90 %.

Tabel 4.2
Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Lombok Timur tahun 2008 -2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp) (1)	Total Pendapatan (Rp) (2)	Derajat Desentralisasi (%) (1:2)
2008	42.016.500,00	759.556.800,00	5,53%
2009	43.874.700,00	842.985.200,00	5,20%
2010	43.874.700,00	992.004.700,00	4,42%
2011	43.874.700,00	992.004.700,00	4,42%
2012	64.551.460,00	1.201.199.210,00	5,37%
2013	97.249.110,00	1.434.649.860,00	6,78%
2014	180.308.180,00	1.693.781.530,00	10,65%
2015	218.906.890,00	2.007.874.610,00	10,90%
2016	236.147.470,00	2.223.806.970,00	10,62%
2017	398.088.460,00	2.546.025,461,00	14,12%
Rata-rata	115.111.189,00	1.384.164.511,00	7,45%

Sumber: Data Diolah (2018)

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 4.3 memperlihatkan rasio ketergantungan dari tahun 2007- 2018, dengan rata-rata rasio ketergantungan adalah 77,87%,

hal ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada pemerintah pusat/provinsi.

Tabel 4.3 juga menunjukkan rasio ketergantungan mengalami penurunan dari tahun 2007- 2018, rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu 93,33%, rasio ini secara rata-rata mengalami penurunan hingga tahun 2018, kemudian rasio terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 49,13%.

Tabel 4.3
Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Lombok Timur tahun 2007- 2018

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp) (1)	Total Pendapatan (Rp) (2)	Rasio Ketergantungan (%) (1:2)
2008	708.941.100,00	759.556.800,00	93,33%
2009	725.462.300,00	842.985.200,00	86,01%
2010	825.263.700,00	992.004.700,00	83,19%
2011	825.263.700,00	992.004.700,00	83,19%
2012	1.039.396.130,00	1.201.199.210,00	86,52%
2013	1.129.526.740,00	1.434.649.860,00	78,73%
2014	1.243.781.000,00	1.693.781.530,00	73,43%
2015	1.335.017.550,00	2.007.874.610,00	66,49%
2016	1.749.586.150,00	2.223.806.970,00	78,68%
2017	1.250.863.950,00	2.546.025,461,00	49,13%
Rata-rata	1.138.210.232,00	1.384.164.511,00	77,87%

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah yang di tampilkan pada tabel 4.4 memperlihatkan terjadi peningkatan rasio kemandirian dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2009 dan 2010 dan 2011 terjadi penurunan yaitu rasio tahun 2009 dan 2010 sebesar 5,20% dan tahun 2011 sebesar 4, 62 dan inilah yang paling rendah. Sementara, rasio yang paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 11, 91. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah yaitu 7,17%. Hal ini dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan

daerah masih sangat rendah.

Tabel 4.4
Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Lombok Timur
Tahun 2008-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp) (1)	Transfer + Propinsi + Pinjaman (Rp) (2)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%) (1:2)
2008	42.016.500,00	759.556.800,00	5,53%
2009	43.874.700,00	842.985.200,00	5,20%
2010	43.874.700,00	842.985.200,00	5,20%
2011	43.874.700,00	948.130.000,00	4,62%
2012	64.551.460,00	1.197.613.850,00	5,39%
2013	97.249.110,00	1.337.436.750,00	7,27%
2014	180.308.180,00	1.513.473.340,00	11,91%
2015	218.906.890,00	2.504.563.100,00	8,74%
2016	236.147.470,00	3.499.172.300,00	6,74%
2017	398.088.460,00	3.599.727.899,00	11,06%
Rata-rata	115.111.189,00	1.704.564.444,00	7,17%

4.2.2 Analisis Penerimaan Pajak Daerah

1. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah memperlihatkan perubahan yang berfluktuasi selama 10 tahun, rasio paling efektif terjadi pada tahun 2012 dengan persentase 157,30%, dan rasio yang cukup efektif terjadi pada tahun 2010 sebesar 91,88%. Sementara, rasio yang tidak efektif terjadi pada tahun 2014-2017, turunnya keefektifan ini disebabkan oleh setengah dari jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tidak terealisasi yaitu pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Tabel 4.5
Rasio Efektivitas Pajak Daerah Pemerintah Daerah Lombok Timur
tahun 2008-2017

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp) (1)	Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp) (2)	Rasio Efektivitas Pajak Daerah (%) (1:2)
2008	5.545.000,00	5.932.700.00	106.99%
2009	5.545.000,00	6.732.000.00	121.41%
2010	6.297.000,00	7. 578.600.00	91.88%
2011	6.727.000,00	5. 077.490.00	52. 12%
2012	8.028.440,00	12.633.960,00	157.30 %
2013	12.043.000,00	15.059.130.00	125.34%
2014	26.037.350,00	40.532.740.00	64.24%
2015	33.035.050,00	47.693.420.00	69.27%
2016	48.156.910,00	67.094.040.00	71.78%
2017	61.020.187,00	83.800.689.00	72.82%
Rata- rata	21.243.493,00	29.213.477,00	97.89%

2. Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Tabel 4.6 menunjukkan tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah, dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa terjadi perubahan yang berfluktuasi dari tahun 2008-2017, persentase rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 9,25%, sedangkan persentase paling rendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 3,73% rendahnya biaya yang dikeluarkan pada pemungutan pajak tahun 2014 merupakan akibat dari tidak terealisasinya anggaran insentif pemungutan pajak daerah pada belanja tidak langsung.

Tabel 4.6
Rasio Efisiensi Pajak Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2008-2017

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak (Rp) (1)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp) (2)	Rasio Efisiensi Pajak Daerah (%) (1:2)
-------	--	---	---

2008	387.700,00	5.545.000,00	6.99%
2009	470.000,00	5.545.000,00	8.48%
2010	511.400,00	6.297.000,00	8.12%
2011	622.020,00	6.727.000,00	9.25%
2012	705.520,00	8.028.440,00	8.79%
2013	1.052.130,00	12.043.000,00	8.74%
2014	1.037.940,00	26.037.350,00	3.99%
2015	1.465.837,00	33.035.050,00	4.44%
2016	1.893.713,00	48.156.910,00	3.93%
2017	2.278.502,00	61.020.187,00	3.73%
Rata-rata	539.328,00	21.243.493,00	6.65%

4.3 Pembahasan

Setelah data ini dianalisis, maka peneliti membuat rekapitulasi hasil penelitian. Berikut ini adalah rekapitulasi hasil penelitian mengenai Analisis Tingkat Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008-2017 sebagaimana yang ditampilkan

Tabel 4.7
Ringkasan Analisis Kinerja APBD
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur

No	Rasio	Hasil Penelitian
1.	Derajat Desentralisasi	7,45%
2.	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	77,87%
3.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	7,17%
4.	Rasio Efektivitas Pajak Daerah	97,89%
5.	Rasio Efisiensi Pajak Daerah	6,65%

4.3.1 Derajat Desentralisasi

Rata-rata derajat desentralisasi selama 10 tahun adalah sebesar 7,45%, hal ini dapat dikatakan masih rendah. Sementara, Tingkat rasio yang paling kecil adalah tahun 2010 dan 2011 yaitu 4,42%, persentase

tingkat derajat desentralisasi paling besar adalah tahun 2015 yaitu 10,90 %. Peningkatan derajat desentralisasi dari tahun ke tahun tidak menjadikan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur termasuk dan mampu menyelenggarakan desentralisasi, hal ini karena rata-rata derajat desentralisasi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur masih dalam kategori rendah, ini berarti pemerintah daerah belum mampu untuk menyelenggarakan desentralisasi dengan mengoptimalkan potensi daerah (PAD) untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang lebih baik.

4.3.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rata-rata rasio ketergantungan selama tahun 2008-2017 menunjukkan angka sangat tinggi yaitu 77,87%, apabila dibandingkan dengan rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten-kabupaten yang lain. Oleh karena itu tingkat ketergantungan pemerintah daerah Lombok Timur dapat dikatakan masih rendah dari kabupaten-kabupaten yang lain.

Meskipun tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur lebih rendah dari daerah yang lain, namun pemerintah Kabupaten Lombok Timur termasuk dalam kategori memiliki tingkat ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi, hal ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada dana yang diterima dari pemerintah pusat/provinsi. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah ini disebabkan masih rendahnya kontribusi PAD dibandingkan pendapatan transfer dalam total pendapatan daerah.

4.3.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah adalah 7,17%, hal ini dapat dikatakan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur masih termasuk dalam kategori rendah dan memiliki pola hubungan konsultatif ini berarti bahwa pemerintah daerah belum cukup mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, namun pengarahannya dan campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang yang berarti bahwa pemerintah daerah dinilai memiliki kemampuan yang meningkat, kemudian sedikit demi sedikit telah mampu untuk menyelenggarakan urusan otonomi daerah.

4.3.4 Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rata-rata rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Lombok Timur selama 10 tahun adalah 97,89%. Rasio efektivitas pajak daerah tahun 2008 -2017 menunjukkan adanya perubahan yang berfluktuasi, sebagian besar rasio efektivitas pajak daerah termasuk kategori cukup efektif, kecuali pada tahun tahun 2014 sampai 2017 termasuk kategori tidak efektif, turunnya keefektifan ini disebabkan oleh setengah dari jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tidak terealisasi yaitu pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atau dengan kata lain, pajak daerah yang memiliki kontribusi yang besar pada pajak daerah tahun tersebut tidak terealisasi sesuai dengan yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan rata-rata rasio efektivitas pajak daerah tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur memiliki kinerja yang sangat baik dalam merealisasikan target pajak daerah.

4.3.5 Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Rata-rata rasio efisiensi pajak adalah 6,65%, yang berarti biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pajak tidak terlalu besar. dapat dilihat bahwa terjadi perubahan yang berfluktuasi dari tahun 2008-2017, persentase rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 9,25%, sedangkan persentase paling rendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 3,73% rendahnya biaya yang dikeluarkan pada pemungutan pajak tahun 2014 merupakan akibat dari tidak terealisasinya anggaran insentif pemungutan pajak daerah pada belanja tidak langsung.

Berdasarkan hal tersebut dapat dinilai bahwa pemerintah daerah Lombok Timurtelah sangat cermat dalam memperhitungkan biaya yang perlu dikeluarkan untuk memperoleh pajak daerah, dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pajak daerah tidak terlalu tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2008 -2017 secara umum dapat dikatakan baik, walaupun desentralisasi masih rendah, ketergantungan pada Pemerintah Pusat/Provinsi tinggi, dan kemandirian keuangan masih rendah.

- 5.1.1 Derajat desentralisasi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2008- 2017 menunjukkan hasil masih rendah.
- 5.1.2 Rasio ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2008- 2017 menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur memiliki ketergantungan yang sangat tinggi.
- 5.1.3 Rasio kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2008- 2017 menunjukkan hasil masih rendah dan memiliki pola hubungan konsultatif.
- 5.1.4 Rasio efektivitas pajak pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2008- 2017 dapat dikatakan cukup efektif dalam mengumpulkan pajak daerah.
- 5.1.5 Rasio efisiensi pajak pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2008- 2017 dapat dikatakan efisien dalam pemungutan pajak daerah.

5.2 SARAN

5.2.1 Saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur

Derajat desentralisasi, kemandirian yang rendah, dan ketergantungan masih tinggi merupakan masalah yang perlu di atasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur, untuk mengatasi masalah ini pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan PAD, dengan cara memperluas basis penerimaan, salah satunya dengan cara mengidentifikasi pembayar pajak potensial.

5.2.2 Saran bagi penelitian selanjutnya

Peneliti selanjutnya perlu untuk menambahkan teknik pengumpulan data yaitu melakukan wawancara, gunanya untuk menanyakan mengenai penyebab terjadinya suatu kenaikan dan penurunan terhadap pendapatan atau belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius, 2002. Pengaruh Kemandirian Terhadap Interaksi Sosial Pada Remaja. Skripsi. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ariyani, 2009. Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
- Ayuningtyas, 2008. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Busnis (online)*, Volume 4, No. 1 ([http://www. Putrafflesia.wordpress.com](http://www.Putrafflesia.wordpress.com)) diakses 14 Mei 2017.
- Erly Suandy. 2011. Hukum Pajak, Edisi 5. Jakarta Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat Jakarta
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Darerah. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Masrun, dkk. 1986. Studi Mengenai Kemandirian Pada Penduduk di Tiga Suku (Jawa, Batak, Bugis). Laporan Penelitian. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

- Mudrajad K. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2005. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Siti Fatimah, 2017. Analisis Dana Perimbangan Kaitannya dengan Percepatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Tahun 2012-2016. Penerbit : *Jurnal Ilmu Manajen dan Busnis (online)*, Volume 5, No. 1 (<http://www.Unram.wordpress.com>) diakses 14 Mei 2017.
- Suryabrata, Sumadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Tangkilisan. 2007. Manajemen Publik, Jakarta: Geasindo
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yani, Ahmad. 2013. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.